

Katalog: 9302020.3210

ISSN: 2686-3561

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN MAJALENGKA
MENURUT PENGELUARAN**

2019-2023

Volume 12, 2024



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MAJALENGKA**

Katalog: 9302020.3210

ISSN: 2686-3561

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN MAJALENGKA
MENURUT PENGELUARAN**

2019-2023

Volume 12, 2024

<https://majalengkakab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MAJALENGKA**

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN MAJALENGKA
MENURUT PENGELUARAN 2019-2023**

Volume 12, 2024

Katalog: 9302020.3210

ISSN: 2686-3561

Nomor Publikasi: 32100.24003

Ukuran Buku: 17,6 x 25 cm

Jumlah Halaman: xvi + 90 halaman

Penyusun Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka

Pembuat Kover:

Subdirektorat Konsolidasi Neraca Produksi Regional

Penerbit:

© Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka

Dicetak oleh:

CV. Setya Mandiri Jaya

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka

TIM PENYUSUN

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN MAJALENGKA MENURUT PENGELUARAN 2019-2023

Volume 12, 2024

Pengarah:

Joni Kasmuri, S.S.T., S.E., M.E.

Penanggung Jawab:

Joni Kasmuri, S.S.T., S.E., M.E.

Penyunting:

Fenty Jimika, S.S.T., M.A.P.

Pengolah Data dan Penulis Naskah:

Fenty Jimika, S.S.T., M.A.P.

Deni Rakhmat Kusuma, SP, M.Ec., Dev.

Yesi Desiawati Sirman, S.S.T., M.A.P.

Penata Letak/Layouter:

Yesi Desiawati Sirman, S.S.T., M.A.P.

Deni Rakhmat Kusuma, SP, M.Ec., Dev.

KEPALA BPS KABUPATEN MAJALENGKA



JONI KASMURI, S.S.T., S.E., M.E.

KATA PENGANTAR

Produkt Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kami menghaturkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan publikasi ini. Tak lupa kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Terakhir, kami menyadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi di masa mendatang. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Majalengka, April 2024
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Majalengka,



Joni Kasmuri

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GRAFIK	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	3
1.2 Perubahan Tahun Dasar PDRB	7
BAB II. METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	13
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT)	15
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT)	17
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P)	19
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	22
2.5 Perubahan Inventori (PI)	25
2.6 Ekspor Impor	28
BAB III. TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN MAJALENGKA MENURUT PDRB PENGELUARAN TAHUN 2019-2023	31
3.1 Perkembangan PDRB Pengeluaran	33
3.2 Perkembangan Komponen PDRB Pengeluaran	43
3.2.1 Konsumsi Akhir Rumah Tangga	43
3.2.2 Konsumsi Akhir LNPRT	51
3.2.3 Konsumsi Akhir Pemerintah	53
3.2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	56
3.2.5 Perubahan Inventori	60
3.2.6 Net Ekspor Barang dan Jasa	63

	Halaman
BAB IV. PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT PENGELUARAN, KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019-2023	65
4.1 PDRB (Nominal)	67
4.2 Proporsi Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB	69
4.3 Incremental Capital Value Added Ratio (ICVAR)	70
BAB V. PENUTUP	75
LAMPIRAN	79
DAFTAR PUSTAKA	89

<https://majalengkakab.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Majalengka, Tahun 2019-2023	34
Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Majalengka, Tahun 2019-2023	35
Tabel 3. Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Majalengka, Tahun 2019-2023	38
Tabel 4. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Majalengka, Tahun 2019-2023	40
Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Majalengka, Tahun 2019-2023	42
Tabel 6. Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Majalengka, Tahun 2019-2023	43
Tabel 7. Perkembangan Komponen Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Majalengka, Tahun 2019-2023	45
Tabel 8. Struktur Komponen Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Majalengka, Tahun 2019-2023	46
Tabel 9. Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Majalengka, Tahun 2019-2023	47
Tabel 10. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Majalengka, Tahun 2019-2023	50
Tabel 11. Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Kabupaten Majalengka, Tahun 2019-2023	51
Tabel 12. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Majalengka, Tahun 2019-2023	55

Tabel 13.	Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Majalengka, Tahun 2019-2023	58
Tabel 14.	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Majalengka, Tahun 2019-2023	61
Tabel 15.	Perkembangan Net Ekspor Kabupaten Majalengka, Tahun 2019-2023	64
Tabel 16.	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Majalengka, Tahun 2019-2023	68
Tabel 17.	Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Majalengka, Tahun 2019-2023	69

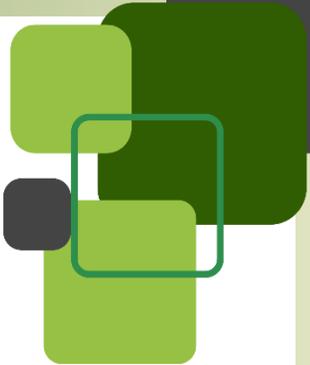
<https://majalengkakab.bps.go.id>

DAFTAR GRAFIK

		Halaman
Grafik 1.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Majalengka, Tahun 2019-2023	34
Grafik 2.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Majalengka, Tahun 2019-2023	37
Grafik 3.	Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Majalengka, Tahun 2019-2023	37
Grafik 4.	Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Majalengka, Tahun 2019-2023	39
Grafik 5.	Pertumbuhan Komponen PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Majalengka, Tahun 2019-2023	41

DAFTAR LAMPIRAN

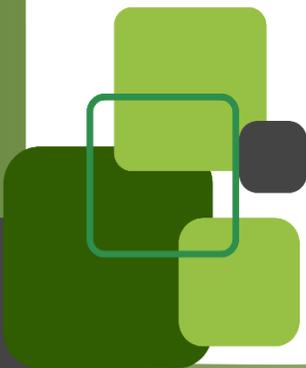
	Halaman
Lampiran 1. PDRB Kabupaten Majalengka Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (juta rupiah), Tahun 2019-2023	81
Lampiran 2. PDRB Kabupaten Majalengka Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (juta rupiah), Tahun 2019-2023	82
Lampiran 3. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Majalengka Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (persen), Tahun 2019-2023	83
Lampiran 4. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Majalengka Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (persen), Tahun 2019-2023	84
Lampiran 5. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Majalengka Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (persen), Tahun 2019-2023	85
Lampiran 6. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Majalengka Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (persen), Tahun 2019-2023	86
Lampiran 7. Indeks Implisit PDRB Kabupaten Majalengka Menurut Pengeluaran (2010=100), Tahun 2019-2023	87
Lampiran 8. Laju Pertumbuhan Indeks Implisit PDRB Kabupaten Majalengka Menurut Pengeluaran (2010=100), Tahun 2019-2023 (persen)	88



BAB I

PENDAHULUAN

<https://majalengkakab.bps.go.id>



1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel Pengeluaran Konsumsi Akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Sungguhpun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)¹. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

¹ Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung “neto” (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

Secara konsep² penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan Metode pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical discrepancy*).

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data

² *Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)*

empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, Metode dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak memperlakukan adanya perbedaan (*statistical discrepancy*) tersebut.

Penyusunan data **PDRB Pengeluaran** juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat³, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai “**output akhir (*final output*)**”. Mengkaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan *Keynesian* sbb :

3. - Yang dimaksud adalah Rumah Tangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik
- Disebut sebagai pendekatan “riil”
- Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Y (<i>Income</i>)	= PDRB Produksi
C (<i>Consumption</i>)	= Konsumsi akhir
GFCF (<i>Gross Fixed Capital Formation</i>)	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
Δ Inventori	= Perubahan Inventori
X	= Ekspor
M	= Impor

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan “identik” dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta Δ Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai “ekspor neto” .

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat terntang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan “riil”, serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

1.2 PERUBAHAN TAHUN DASAR PDRB

Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts (SNA)* adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables (SUT)* Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas PDRB;
- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- a. Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
- b. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- c. Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sbb:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;

- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun⁴;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
- Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- Konsep dan Cakupan
 - a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). *CBR* merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.
 - b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). *MWS* merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan

⁴ SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.

- c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). *RnD* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti *RnD* tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
- d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). *MEE* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
- e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
- f. Komputer software (*computer software and databases/CSD*). *CSD* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan *databases*, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
- g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). *ELA* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
- h. pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya

eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

- Metodologi

Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan Metode FISIM (*Financial intermediation services indirectly measured/FISIM*). FISIM dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metode ini menggantikan metode *Imputed Bank Services Charge (IBSC)*.

- Valuasi

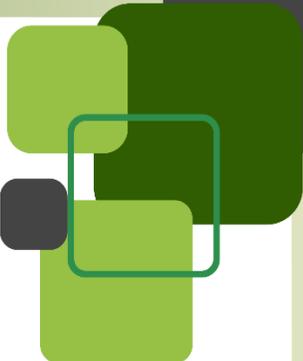
Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

- Klasifikasi

Klasifikasi yang digunakan adalah *Internasional Standard Industrial Classification (ISIC rev.4)* dan *Central Product Classification (CPC rev.2)*. BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

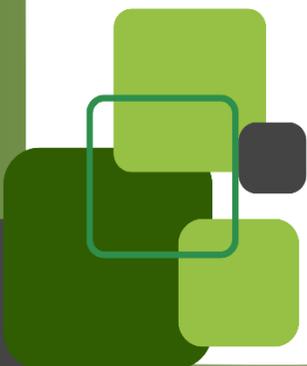
PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Perubahan Inventori	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor	5. Perubahan Inventori
6. Impor	6. Ekspor
	7. Impor



BAB II

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

<https://majalengkakab.bps.go.id>



2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA (PK-RT)

I. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran¹. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

II. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

III. Cakupan

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP)*, sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alas kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya

¹ Untuk Kabupaten/Kota yang mempunyai hasil tambang/industri/perkebunan dan nilai eksportnya sangat tinggi, umumnya nilai konsumsi rumah tangganya relatif lebih rendah

5. Furnitur, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun dalam publikasi ini, PK-RT hanya diklasifikasi ke dalam 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

IV. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional/Daerah (Susenas/Suseda), BPS
- Survei Khusus Konsumsi Rumah Tangga Triwulanan (SKKRT), BPS
- Sensus Penduduk 2010, BPS
- Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
- Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

V. Metode Estimasi

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan Metode sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas/Suseda (untuk PK-RT Tahunan)

2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan)
3. Data poin 2 dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;
5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku) ;
6. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);
7. Nilai PK-RT atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

Catatan:

Komponen PK-RT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan konsumsi Rumah Tangga triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SKKRT.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAH TANGGA (PK-LNPRT)

I. Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok Rumah Tangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

II. Konsep dan Definisi

LNPRT merupakan bagian dari Lembaga Non Profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumah tangga.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

III. Cakupan

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh: pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh: upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lain
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

IV. Sumber Data

- a. Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga (SK-LNP), BPS
- b. SK-LNP Triwulanan (SK-LNPT), BPS
- c. Hasil *up-dating* direktori LNPRT, BPS
- d. Indeks Harga Konsumen, BPS

V. Metode Estimasi

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan Metode sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;
3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku);
5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

Catatan :

Komponen PK-LNPRT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi LNPRT triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SK-LNPT.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P)

I. Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok Rumah Tangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan

lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

II. Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidental dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam praktek, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non komoditi atau pendapatan jasa.

III. Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah Kabupaten Majalengka mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

PK-P Kabupaten Majalengka mencakup: a). PK-P desa/kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Majalengka; b). PK-P Kabupaten Majalengka yang bersangkutan; c). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P Kabupaten Majalengka.

IV. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P Kabupaten Majalengka tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBD Tahunan, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- b. Statistik Keuangan Daerah, BPS
- c. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia
- d. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- e. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
- f. Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

V. Metode Estimasi

Komponen PK-P Kabupaten Majalengka Tahunan diestimasi dengan menggunakan Metode:

$$\text{PK-P Atas Dasar Harga Berlaku} = \text{Output} - \text{Penjualan barang dan jasa} + \text{Social transfer in kind purchased market production} + \text{Output Bank Indonesia}$$

Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Catatan :

1. Komponen PK-P Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah triwulanan

PK-P atas dasar harga Konstan diestimasi dengan men-*deflate* PK-P atas dasar harga Berlaku dengan menggunakan deflator berikut:

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penyusutan	Indeks Implisit PMTB	
Belanja Bansos	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan barang dan jasa	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Social Transfer in kind	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Output BI		Neraca Jasa

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

I. Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investasi yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

II. Konsep dan Definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya (*Cultivated Biological Resources/CBR*). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

III. Cakupan

PMTB mencakup :

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*);
2. Biaya alih kepemilikan atas aset non finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir.

IV. Sumber Data

- a. Output industri konstruksi, BPS
- b. Nilai impor 2 digit HS, BPS
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
- d. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
- f. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas), BPS
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum, BPS
- i. Publikasi Statistik Konstruksi, BPS
- j. Data Eksplorasi Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

V. Metode estimasi

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan Metode langsung ataupun Metode tidak langsung tergantung ketersediaan data di masing-masing daerah.

- ✓ Metode Langsung:

PMTB Atas Dasar Harga Berlaku (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM
+ Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB Atas Dasar Harga Berlaku (Impor) = Barang Modal Impor + TTM + Bea
Impor + Biaya Instalasi

PMTB Atas Dasar Harga Konstan diperoleh dengan cara men-*deflate* PMTB
Atas Dasar Harga Berlaku dengan IHPB sbb:

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHB}}{IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

- ✓ Metode Tidak Langsung:

Pendekatan Supply:

PMTB Atas Dasar Harga Berlaku = Total Supply Barang x Rasio PMTB

Pendekatan Ekstrapolasi:

PMTB Atas Dasar Harga Konstan (t) = PMTB Atas Dasar Harga Konstan (t-1) x Indeks Produksi (t)

2.5 PERUBAHAN INVENTORI (PI)

I. Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

II. Konsep dan Definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori

menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi Rumah Tangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

III. Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);

- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
- h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

IV. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah :

1. Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
2. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD, Data Sekunder dari luar BPS
3. Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalian BPS;
4. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
5. Data komoditas perkebunan;
6. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
7. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
8. Data persediaan beras, Bulog; data semen, Asosiasi Semen Indonesia; data gula, Dewan Gula Indonesia ; dan data ternak, Ditjennak Kementan.

V. Metode Estimasi

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan Metode revaluasi atau Metode deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

a. Metode Revaluasi

Metode ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

$$\text{PI atas dasar harga Berlaku} = (\text{Volume inventori (t)} - \text{Volume inventori (t-1)}) \times \text{Harga per unit}$$

$$\text{PI atas dasar harga Konstan} = \text{PI atas dasar harga Berlaku/IHPB}$$

b. Metode Deflasi

Metode ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

$$\text{PI Atas Dasar Harga Konstan} = \text{Inventori (t) Atas Dasar Harga Berlaku/ IHPB (t)} - \text{Inventori (t-1) Atas Dasar Harga Berlaku/IHPB (t-1)}$$

$$\text{PI Atas Dasar Harga Berlaku} = \text{PI Atas Dasar Harga Konstan} \times \text{IHPB rata-rata (t)}$$

2.6 EKSPOR - IMPOR

I. Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestiknya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah.

II. Konsep dan Definisi

Ekspor-impor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

III. Cakupan

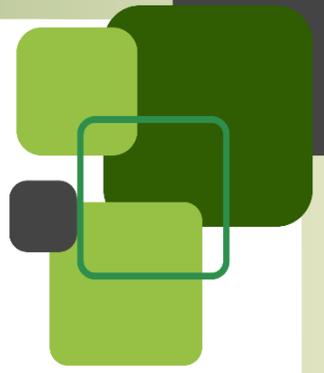
Ekspor-Import ke dan dari suatu wilayah Kabupaten Majalengka terdiri dari:

- a. Ekspor ke luar Kabupaten Majalengka
- b. Import dari luar Kabupaten Majalengka.

Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

IV. Sumber Data

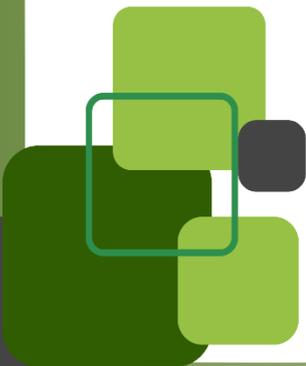
Nilai ekspor-impor wilayah Kabupaten Majalengka didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasi tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor Kabupaten Majalengka diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan menggunakan Metode tidak langsung.



BAB III

TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN MAJALENGKA BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN TAHUN 2019-2023

<https://majalengkakab.go.id>



3.1. PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN

Indikator perekonomian makro dijelaskan oleh PDRB baik dari sisi penawaran maupun dari sisi permintaan. Tinjauan dari sisi penawaran dijabarkan pada PDRB Menurut Lapangan Usaha, sedangkan dari sisi permintaan dijabarkan oleh PDRB Menurut Pengeluaran. Pertumbuhan keduanya merupakan instrumen yang digunakan sebagai evaluasi terhadap keberhasilan program pembangunan ekonomi suatu Pemerintah Daerah. PDRB Menurut Lapangan Usaha menjabarkan perekonomian dalam hal penciptaan nilai tambah atas produksi barang dan jasa secara agregat oleh seluruh lapangan usaha, sedangkan PDRB Menurut Pengeluaran menjabarkan bagaimana seluruh produk barang dan jasa tersebut digunakan.

Lebih spesifik PDRB Menurut Pengeluaran menjabarkan perilaku sektor pelaku ekonomi dalam melakukan pengeluaran konsumsi akhir, investasi dan perdagangan antar wilayah serta antar negara. Pengeluaran konsumsi akhir dilakukan oleh Rumah Tangga, Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR) serta Pemerintah. Konsumsi yang dilakukan oleh korporasi dalam rangka proses produksi disebut konsumsi antara dan bukan merupakan komponen PDRB Menurut Pengeluaran. Investasi dalam hal ini Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang dilakukan oleh seluruh sektor pelaku ekonomi yaitu Rumah Tangga, LNPR, Pemerintah, Korporasi baik swasta maupun BUMN dan BUMD. Juga menggambarkan agregat perubahan inventori, serta perdagangan luar wilayah baik antar provinsi maupun antar negara.

Sebelum merebaknya pandemi covid-19 di tahun 2020, PDRB Kabupaten Majalengka meningkat cukup signifikan. Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Adanya peningkatan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*). Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada kategori industri pengolahan yang rata-rata tumbuh di atas 10 persen tiap tahun. Sedangkan dari sisi permintaan akhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majalengka didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT), yang memberikan kontribusi sekitar 70 persen tiap tahun.

Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Majalengka 2019-2023

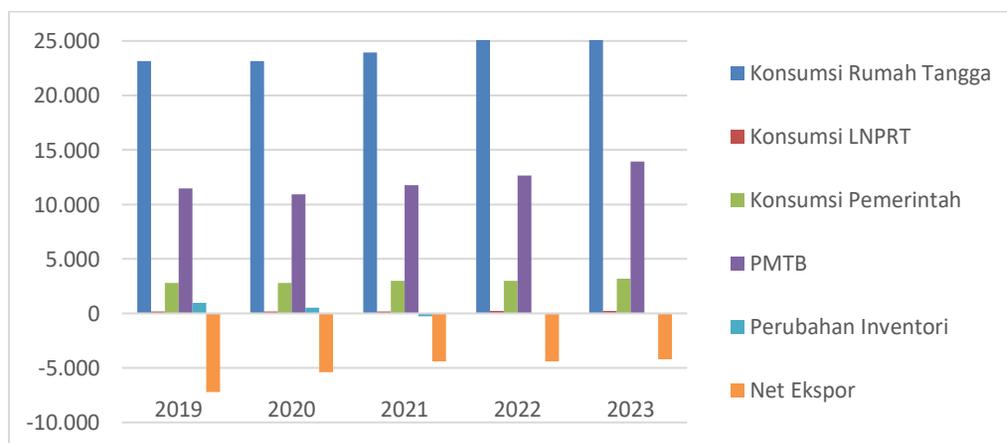
(Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	23.152,52	23.135,00	23.918,22	26.304,96	28.547,02
2. Konsumsi LNPRT	192,88	188,75	193,44	207,88	245,38
3. Konsumsi Pemerintah	2.772,95	2.808,04	2.966,77	3.000,81	3.196,79
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	11.463,28	10.947,53	11.775,55	12.639,16	13.925,03
5. Perubahan Inventori	985,91	508,12	-280,49	32,87	28,71
6. Net Ekspor (Ekspor-Impor)	-7.227,29	-5.408,23	-4.416,49	-4.408,57	-4.229,48
PDRB	31.340,23	32.179,21	34.157,00	37.777,11	41.713,45

Keterangan: *sementara **sangat sementara

Dari Tabel 1 dapat terlihat bahwa pada kurun waktu 5 tahun terakhir (2019-2023), secara nominal, nilai PDRB Kabupaten Majalengka atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 dibanding tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 3.936,34 miliar rupiah, yakni dari 37.777,11 miliar rupiah menjadi 41.713,45 miliar rupiah. komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang terbesar dalam PDRB Kabupaten Majalengka. Kemudian disusul oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) serta komponen pengeluaran konsumsi pemerintah yang secara berturut-turut menduduki peringkat kedua dan ketiga sebagai komponen penyumbang terbesar PDRB Majalengka dari sisi pengeluaran.

Grafik 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Majalengka, Tahun 2019-2023 (Miliar Rupiah)



Jika ditelaah lebih mendalam, pada Grafik 1 dapat terlihat bahwa net ekspor selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir selalu bernilai negatif, atau mengalami defisit perdagangan. Hal ini mengindikasikan masih adanya ketergantungan terhadap barang atau jasa yang berasal/diproduksi dari luar daerah. Fakta menariknya, ketergantungan tersebut dari tahun ke tahun semakin mengecil. Adanya defisit perdagangan ini tentunya mereduksi besaran nilai PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi. Seiring dengan semakin berkembangnya industri pengolahan dan sektor jasa di Kabupaten Majalengka, diharapkan di masa mendatang Kabupaten Majalengka mampu memenuhi sendiri kebutuhan barang dan jasanya sehingga neraca perdagangan antar daerah atau net ekspor bisa bernilai positif.

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divalusi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDB atas dasar harga Konstan 2010 Kabupaten Majalengka pada periode 2019-2023 dapat dilihat dari Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Majalengka, Tahun 2019-2023

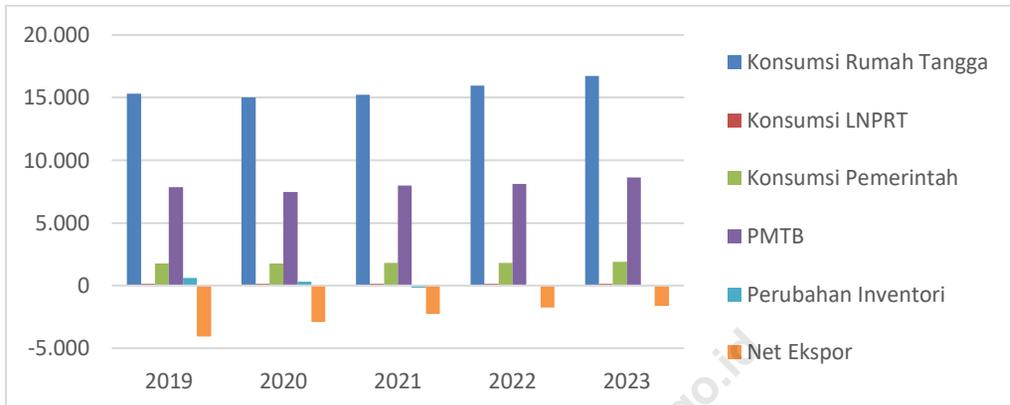
(Miliar Rp)					
Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	15.309,25	15.000,53	15.254,12	15.969,39	16.739,59
2. Konsumsi LNPR	136,28	130,74	132,63	137,44	155,79
3. Konsumsi Pemerintah	1.759,53	1.761,38	1.828,27	1.804,50	1.876,64
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	7.848,13	7.462,53	7.980,04	8.114,68	8.647,48
5. Perubahan Inventori	590,70	302,70	-156,63	18,35	15,64
6. Net Ekspor (Ekspor-Impor)	-4.082,17	-2.903,35	-2.250,53	-1.746,25	-1.641,90
PDRB	21.561,72	21.754,54	22.787,90	24.298,11	25.793,24

Keterangan: *sementara **sangat sementara

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan persentase perubahan nilai PDRB atas dasar harga konstan (2010=100) tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selama periode lima tahun terakhir secara berturut-turut laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majalengka yakni sebesar 7,77 persen (2019); 0,89 persen (2020); 4,75 persen (2021); 6,63 persen (2022) dan 6,15 persen (2023). Dari data series tersebut, perekonomian Kabupaten Majalengka memperlihatkan adanya peningkatan. Laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan arah positif dan terus meningkat, hanya saja di tahun 2020 dan 2023 laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan perlambatan dari tahun sebelumnya. Perekonomian di tahun 2020 sedikit mengalami perlambatan dikarenakan munculnya pandemi covid-19 yang berdampak pada perubahan struktur ekonomi secara global maupun regional. Akan tetapi dampak negatif dari pandemi tersebut tidak berlarut-larut, di tahun 2021 perekonomian di Kabupaten Majalengka kembali menggeliat dan mampu *bounce back* dalam waktu yang relatif cepat.

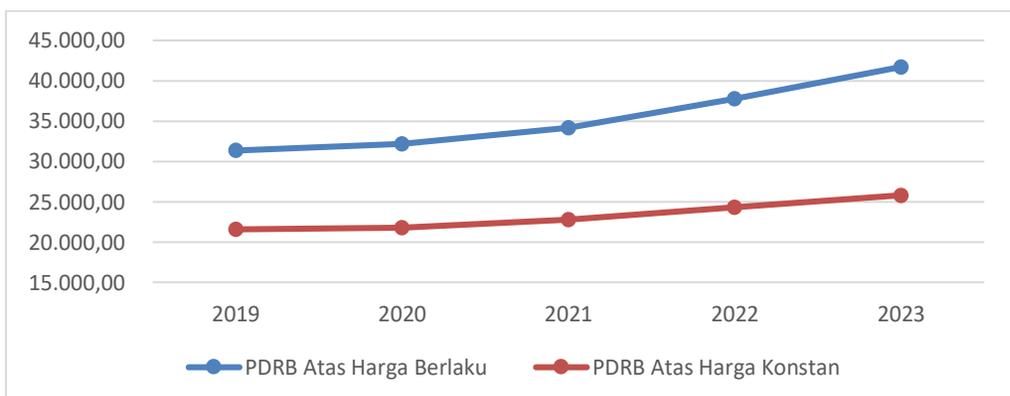
Dari Tabel 2, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga konstan di Kabupaten Majalengka selama periode 5 (lima) tahun terakhir terus meningkat. Pada tahun 2023, semua komponen pembentuk PDRB Pengeluaran bernilai positif, kecuali net ekspor. Yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (PK-RT), pengeluaran konsumsi LNPRT (PK-LNPRT), pengeluaran konsumsi pemerintah (PK-P), komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) serta komponen perubahan inventori. Hanya komponen net ekspor yang masih bernilai negatif atau menahan laju pertumbuhan.

Grafik 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Majalengka, Tahun 2019-2023



Grafik 2 memperlihatkan bahwa selama masa pandemi covid-19, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Majalengka mampu bertahan dan tidak mengalami perlambatan atau kontraksi ekonomi yang terlalu dalam. Di masa puncak pandemi Covid-19, tepatnya di tahun 2020, tercatat Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) masih positif diangka 0,89 persen, di tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majalengka kembali *recovery* ke angka 4,75 persen, kemudian kembali meningkat menjadi 6,63 persen di tahun 2022. Pada tahun 2023, laju pertumbuhan ekonomi masih cukup tinggi meskipun mengalami sedikit perlambatan dibandingkan tahun 2022, yaitu sebesar 6,15 persen.

Grafik 3. Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Majalengka, Tahun 2019-2023 (Miliar Rupiah)



Pada Grafik 3, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga konstan. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sedangkan pada PDRB atas dasar harga konstan, pengaruh dari harga tersebut telah ditiadakan. Sama halnya PDRB atas dasar harga berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga konstan juga menunjukkan peningkatan.

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor minus impor barang dan jasa. Distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran Kabupaten Majalengka Tahun 2019-2023 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Majalengka, Tahun 2019-2023

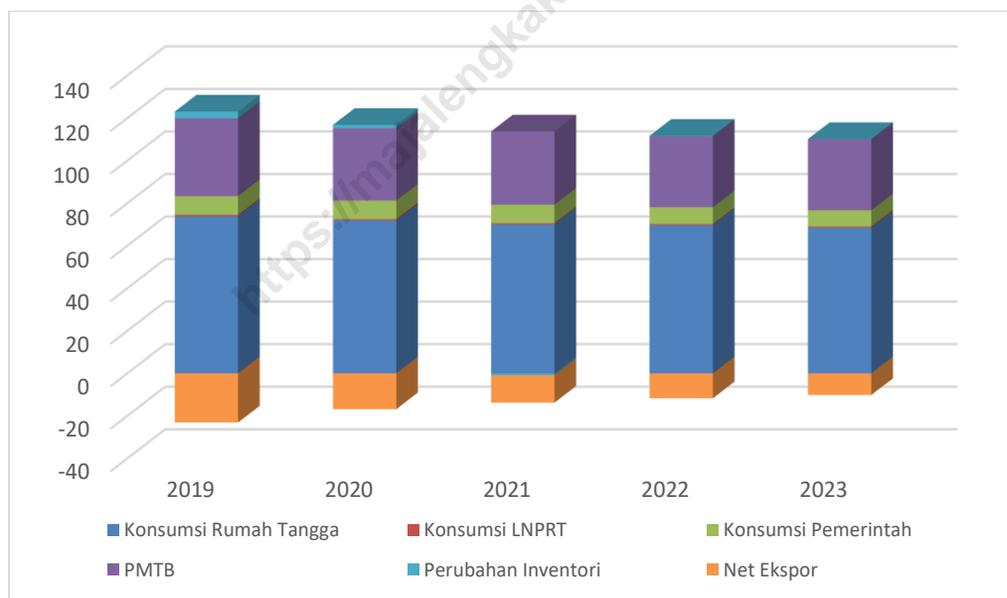
(Persen)					
Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	73,87	71,89	70,02	69,63	68,44
2. Konsumsi LNPRT	0,62	0,59	0,57	0,55	0,59
3. Konsumsi Pemerintah	8,85	8,73	8,69	7,94	7,66
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	36,58	34,02	34,47	33,46	33,38
5. Perubahan Inventori	3,15	1,58	-0,82	0,09	0,07
6. Net Ekspor (Ekspor-Impor)	-23,06	-16,81	-12,93	-11,67	-10,14
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan: *sementara **sangat sementara

Dari Tabel 3 terlihat bahwa selama periode 2019-2023, PDRB Kabupaten Majalengka sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir Rumah Tangga (PK-RT). Komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga besarannya setiap tahun mengalami peningkatan, tetapi kontribusinya terhadap total PDRB terus mengalami penurunan. Disamping itu, terlihat bahwa pengeluaran

untuk aktivitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, yakni sekitar 33-37 persen. Disisi lain komponen net ekspor sebagai komponen pereduksi (pengurang) dalam PDRB juga masih berkontribusi relatif besar, yakni sekitar 10-23 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk barang atau jasa yang berasal dari luar wilayah atau bahkan luar negeri (impor). Sementara itu, kontribusi komponen konsumsi pemerintah (PK-P) setiap tahun berada pada rentang 8-9 persen. Hal tersebut menempatkan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah (PK-P) sebagai kontributor PDRB Kabupaten Majalengka terbesar ketiga, dibawah komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga dan PMTB.

Grafik 4. Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Majalengka, Tahun 2019-2023 (Persen)



Berdasarkan informasi yang tersaji dari Grafik 4 di atas, terlihat bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir, persentase kontribusi komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (PK-RT) terhadap PDRB cenderung mengalami tren penurunan. Di tahun 2019 tercatat kontribusi komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB Kabupaten Majalengka berada di angka 73,87 persen, sedangkan di tahun 2023 kontribusinya menurun hingga hanya berkontribusi sebesar 68,44 persen terhadap total PDRB.

Tabel 4. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Majalengka, Tahun 2019-2023

<i>(Persen)</i>					
Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4,77	-2,02	1,69	4,69	4,82
2. Konsumsi LNPRT	2,65	-4,07	1,45	3,63	13,35
3. Konsumsi Pemerintah	3,33	0,11	3,80	-1,30	4,00
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,46	-4,91	6,93	1,69	6,57
5. Perubahan Inventori					
6. Net Ekspor (Ekspor-Impor)					
PDRB	7,77	0,89	4,75	6,63	6,15

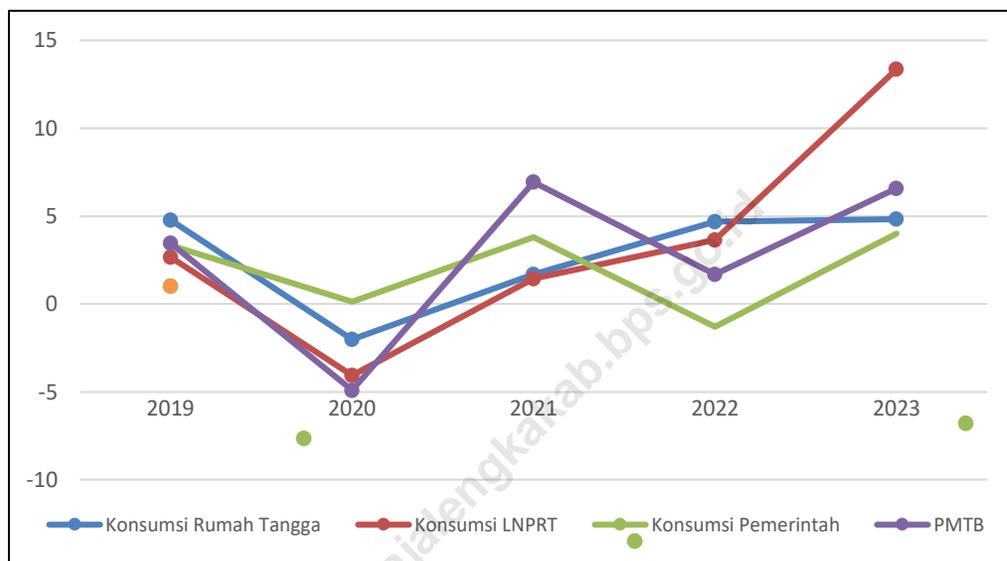
Keterangan: *sementara **sangat sementara

Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau laju pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sebagaimana terlihat dari Tabel 4, selama periode tahun 2019-2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majalengka terus mengalami pertumbuhan, yakni sebesar 7,77 persen (2019); 0,89 persen (2020); 4,75 persen (2021); 6,63 persen (2022) dan 6,15 persen (2023).

Merujuk data pada Tabel 4, pada tahun 2023, komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) mengalami pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menyiratkan bahwa daya beli masyarakat mengalami peningkatan

yang cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini juga mengindikasikan bahwa perekonomian mulai pulih setelah adanya resesi akibat pandemi.

Grafik 5. Pertumbuhan Komponen PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran (dalam persen), Kabupaten Majalengka 2019-2023



Dari Grafik 5 terlihat bahwa komponen pengeluaran konsumsi LNPRT menyentuh angka pertumbuhan tertinggi di tahun 2023, dimana angka pertumbuhan mencapai 13,35 persen. Pertumbuhan itu selaras dengan kondisi faktual di lapangan, dimana pada tahun itu, merupakan tahun persiapan Pemilu 2024.

Indeks implisit¹ PDRB pengeluaran menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi dari sisi konsumen (Rumah Tangga, LNPRT, pemerintah, dan perusahaan) akhir barang dan jasa, baik yang digunakan untuk keperluan konsumsi, investasi maupun ekspor/impor. Indeks implisit PDRB digunakan untuk mengetahui adanya perubahan harga barang dan jasa secara keseluruhan yang lebih dikenal dengan tingkat inflasi.

¹ Indeks perkembangan

Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Majalengka, Tahun 2019-2023

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	151,23	154,23	156,80	164,72	170,54
2. Konsumsi LNPRT	141,53	144,37	145,85	151,25	157,50
3. Konsumsi Pemerintah	157,60	159,42	162,27	166,30	170,35
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	146,06	146,70	147,56	155,76	161,03
5. Perubahan Inventori					
6. Net Ekspor (Ekspor-Impor)					
PDRB	145,35	147,92	149,89	155,47	161,72

Keterangan: *sementara **sangat sementara

Dari Tabel 5 akan terlihat tingkat kenaikan harga selama periode tahun 2019-2023, baik perubahan harga yang terjadi secara umum maupun pada masing-masing komponen. Indeks implisit PDRB Kabupaten Majalengka tahun 2023 mencapai 161,72 persen, yang menunjukkan adanya kenaikan harga sebesar 55,46 persen dibandingkan tahun dasar yaitu tahun 2010.

Pada tahun 2023, sumber laju pertumbuhan ekonomi (*source of growth*) terbesar PDRB pengeluaran Kabupaten Majalengka disumbangkan oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT), besarnya mencapai 3,17 persen. Capaian ini mengulang pencapaian di tahun-tahun sebelum merebaknya pandemi covid-19. Dimana saat itu PK-RT juga menjadi sumber laju pertumbuhan ekonomi terbesar dengan kontribusi berada pada kisaran 3-4 persen. Komponen terbesar lainnya yang menjadi sumber laju pertumbuhan ekonomi Majalengka adalah komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Meningkatnya nilai pembentukan modal tetap bruto (PMTB) merupakan salah satu indikator dari meningkatnya nilai investasi yang masuk ke Kabupaten Majalengka. Lebih lengkap terkait dengan sumber laju pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran Kabupaten Majalengka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 6 berikut.

Tabel 6. Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Majalengka, Tahun 2019-2023

<i>(Persen)</i>					
Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	3,48	-1,43	1,17	3,14	3,17
2. Konsumsi LNPRT	0,02	-0,03	0,01	0,02	0,08
3. Konsumsi Pemerintah	0,28	0,01	0,31	-0,10	0,30
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1,31	-1,79	2,38	0,59	2,19
5. Perubahan Inventori					
6. Net Ekspor (Ekspor-Impor)					
PDRB	7,77	0,89	4,75	6,63	6,15

Keterangan: *sementara **sangat sementara

3.2 PERKEMBANGAN KOMPONEN PDRB PENGELUARAN

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumah tangga, LNPRT dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori. Berikut perilaku masing-masing komponen PDRB pengeluaran Kabupaten Majalengka untuk periode 2019-2023.

3.2.1. Konsumsi Akhir Rumah Tangga

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Majalengka, ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk

(domestik) yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Majalengka maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga.

Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumah tangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumah tangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*), yaitu kelompok makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; angkutan dan komunikasi; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya.

Selama periode 2019-2023, walaupun secara nominal senantiasa meningkat, akan tetapi komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga secara proporsi cenderung menurun terhadap total PDRB, yaitu 73,87 persen (2019); 71,89 persen (2020), 70,02 persen (2021); 69,63 persen (2022) dan 68,44 persen (2023). Posisi tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 73,87 persen dan terendah pada tahun 2023 sebesar 68,44 persen. Walaupun secara nominal nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga mengalami kenaikan, namun peranannya terhadap total PDRB cenderung menurun, hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan nilai nominal di komponen lain bergerak lebih tinggi daripada komponen konsumsi rumah tangga, sehingga terjadi sedikit pergeseran distribusi (proporsi).

Data berikut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2019-2023 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan).

Tabel 7. Perkembangan Komponen Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Majalengka, Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga (Miliar Rp)					
a. ADHB	23.152,52	23.135,00	23.918,23	26.304,96	28.547,02
b. ADHK 2010	15.309,25	15.000,53	15.254,12	15.969,39	16.739,59
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	73,87	71,89	70,02	69,63	68,44
Rata-rata Konsumsi Per Kapita (Ribu Rp)					
a. ADHB	19.068,75	17.763,70	18.188,63	19.807,80	21.293,89
b. ADHK 2010	12.608,92	11.517,83	11.600,00	12.025,05	12.486,45
Pertumbuhan ²					
a. Total Konsumsi Rumah Tangga	4,77	-2,02	1,69	4,69	4,82
b. Konsumsi Per Kapita	3,49	-8,65	0,71	3,66	3,84
Jumlah penduduk (000 orang)	1.214,16 ¹⁾	1.302,38 ²⁾	1.315,01 ³⁾	1.328,01 ³⁾	1.340,62 ³⁾

Keterangan: *sementara **sangat sementara

- 1) Jumlah Penduduk Berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk SUPAS 2015/Number of Population Based on The Result of Population Projection SUPAS 2015
- 2) Jumlah Penduduk Berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023/Number of Population Based on The Result of Interim Population Projection 2020-2023
- 3) Jumlah Penduduk Berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk SP2020/Number of Population Based on The Result of Population Projection SP2020

Pada masa pemulihan ekonomi seperti saat ini, biasanya institusi rumah tangga memperbaiki perilaku atau pola konsumsinya. Hal tersebut terjadi karena secara umum tingkat pendapatan masyarakat akan naik dan di sisi lain persediaan atau penawaran berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik bertambah. Kondisi semacam ini memicu naiknya belanja untuk keperluan konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Sebelum merebaknya pandemi covid-19 pada tahun 2020, total konsumsi rumah tangga dan konsumsi per kapita cenderung naik, searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Munculnya pandemi covid-19 di awal tahun 2020, mengakibatkan seluruh sektor perekonomian mengalami kontraksi yang cukup dalam. Perlambatan

² Diturunkan dari perhitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK 2010)

ekonomi berdampak terhadap menurunnya daya beli masyarakat, hal ini berimbas juga terhadap total konsumsi rumah tangga dan rata-rata konsumsi per kapita. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2020, total konsumsi rumah tangga dan rata-rata konsumsi per kapita mengalami penurunan. Diluncurkannya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tahun 2021 dan 2022, secara perlahan mampu mendongkrak daya beli masyarakat. Seluruh komponen pengeluaran rumah tangga mulai menunjukkan adanya pemulihan, walaupun besaran nilainya belum kembali ke angka seperti sebelum terjadinya pandemi. Sedangkan di Tahun 2023 pemerintah memfokuskan kebijakan fiskal tahun 2023 untuk mendukung kelanjutan pemulihan ekonomi, terutama program-program prioritas. Program-program itu adalah pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan dukungan pertumbuhan ekonomi hijau.

Tabel 8. Struktur Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Majalengka, Tahun 2019-2023

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	51,86	53,32	53,75	54,63	54,65
b. Pakaian dan Alas Kaki	4,84	4,58	4,52	4,32	4,19
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	9,47	9,49	9,21	8,89	8,80
d. Kesehatan dan Pendidikan	6,60	6,93	7,05	6,73	6,59
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	18,12	16,75	16,60	16,74	17,20
f. Hotel dan Restoran	3,80	3,63	3,57	3,54	3,51
g. Lainnya	5,29	5,30	5,30	5,16	5,05
Total Konsumsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan: *sementara **sangat sementara

Jika dirinci berdasarkan komponen penyusunnya, maka komponen pengeluaran untuk makanan, minuman dan rokok (tidak termasuk konsumsi makanan jadi dalam bentuk sajian di restoran, warung makan dan sejenisnya)

memiliki proporsi terbesar dalam struktur komponen konsumsi rumah tangga. Proporsi pengeluaran untuk makanan, minuman dan rokok terhadap total pengeluaran rumah tangga cenderung meningkat dari tahun ke tahun, yaitu 51,86 persen (2019); 53,32 persen (2020); 53,75 persen (2021); 54,63 persen (2022) dan 54,65 persen (2023). Adapun sebaliknya proporsi non makanan terus mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 48,14 persen; pada tahun 2020 sebesar 46,68 persen; pada tahun 2021 sebesar 46,25 persen; pada tahun 2022 sebesar 45,37 persen dan pada tahun 2023 sebesar 45,35 persen. Proporsi terbesar kedua adalah komponen pengeluaran untuk transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya. Proporsi kelompok pengeluaran tersebut setiap tahun berada pada rentang 16-18 persen.

Tabel 9. Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Majalengka, Tahun 2019-2023

(Persen)

Komponen Konsumsi	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	6,06	0,82	2,00	5,00	4,89
b. Pakaian dan Alas Kaki	3,89	-8,23	1,08	3,63	3,77
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	1,48	-0,83	-0,83	3,90	4,35
d. Kesehatan dan Pendidikan	5,22	2,23	4,42	2,71	3,49
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	3,73	-7,60	1,83	6,20	6,11
f. Hotel dan Restoran	6,09	-5,29	0,44	5,00	5,91
g. Lainnya	3,89	-2,89	1,24	1,76	2,45

Keterangan: *sementara **sangat sementara

Apabila dicermati pertumbuhan “riil” nya, pengeluaran rumah tangga untuk kelompok makanan secara berturut-turut menunjukkan tendensi yang meningkat terutama setelah periode pandemi. Pada tahun 2019 menunjukkan pertumbuhan tertinggi selama lima periode (2019-2023) sebesar 6,06 persen. Saat pandemi tahun 2020 masih menunjukkan pertumbuhan positif meski melambat sebesar 0,82 persen. Kecenderungan rumah tangga untuk memprioritaskan konsumsi bahan pangan pokok menjadi salah satu penyebab pertumbuhan, selain itu berbagai bantuan pangan baik

dari pemerintah maupun solidaritas masyarakat turut berpengaruh terhadap pertumbuhan sub komponen ini. Pada periode tahun 2021-2023 seiring dengan pemulihan ekonomi sehingga mendorong konsumsi masyarakat, pertumbuhan konsumsi makanan, minuman dan rokok cenderung meningkat yaitu sebesar 2,00 persen (2021) dan meningkat 5,00 persen (2022), dan pada tahun 2023 kembali meningkat sebesar 4,89 persen.

Pertumbuhan konsumsi pakaian dan alas kaki selama periode 2019-2023 mendapat tekanan pada tahun 2020. Pada tahun 2019 meningkat 3,89 persen, namun menurun tajam di tahun 2020 menjadi -8,23 persen. Pembatasan aktivitas sosial ekonomi menjadi salah satu penyebab masyarakat tidak memprioritaskan pengeluaran sandang sehingga berdampak terhadap penurunan sub komponen ini saat pandemi. Memasuki tahun 2021 kembali berangsur tumbuh sebesar 1,08 persen, disusul pada tahun 2022 meningkat 3,63 persen dan pada tahun 2023 dapat mempertahankan kinerja peningkatan sebesar 3,77 persen.

Pola yang sama terjadi untuk pengeluaran transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya dimana, terjadi tekanan saat pandemi tahun 2020 pembatasan mobilisasi masyarakat untuk beraktivitas menyebabkan penurunan pertumbuhan pada tahun 2020 mencapai -7,60 persen. Seiring dengan membaiknya kondisi pandemi dan semakin banyaknya masyarakat yang telah divaksin, kelompok pengeluaran ini mengalami pertumbuhan 1,83 persen pada 2021, dan meningkat signifikan sebesar 6,20 persen pada 2022 saat tidak ada lagi pembatasan aktivitas masyarakat. Dibukanya kembali perjalanan Umroh dan Haji serta kembali maraknya spot wisata dalam dan luar negeri pada tahun 2022 juga menjadi pendorong pertumbuhan konsumsi pada kelompok komoditi ini, hal ini terus berlangsung hingga pada tahun 2023 mampu mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,11 persen.

Sejalan dengan pola konsumsi sub kelompok transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya maka pengeluaran rumah tangga untuk hotel dan restoran mengalami penurunan tajam saat terjadi pandemi tahun 2020 sebesar -5,29 persen. Seiring dengan semakin longgarnya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat dan

kondisi pandemi yang semakin membaik pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan sebesar 0,44 persen. Sejak dibukanya kembali obyek wisata dan penerbangan internasional, sehingga aktivitas perjalanan pariwisata, umroh dan haji serta bisnis bangkit kembali dan telah menuju normal. Pariwisata sangat terkait dengan konsumsi pada kelompok komoditi hotel dan restoran. Hal ini mendukung peningkatan signifikan sub kelompok hotel dan restoran pada dua periode berturut-turut 2022-2023 masing-masing sebesar 5,00 persen dan 5,91 persen.

Sebagaimana pola pertumbuhan kelompok makanan, minuman dan tembakau, kelompok kesehatan dan pendidikan terus mengalami pertumbuhan positif selama lima tahun terakhir, meskipun pada tahun 2020 mengalami perlambatan dengan tumbuh sebesar 2,23 persen dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 5,22 persen. Pada tahun 2021 kembali meningkat sebesar 4,42 persen seiring dengan mulai dilakukan kembali pembelajaran tatap muka namun pada tahun 2022 pertumbuhan melambat sebesar 2,71 persen. Pada tahun 2023 kembali terjadi peningkatan sebesar 3,49 persen hal ini menunjukkan dana yang dikeluarkan rumah tangga untuk konsumsi kesehatan dan pendidikan meningkat. Hal ini terkait kenaikan biaya pendidikan pada tahun ajaran baru sehingga memicu inflasi pendidikan di bulan Juli 2023.

Tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam Tabel 10, menunjukkan peningkatan setiap tahunnya untuk setiap kelompok konsumsi. Perubahan tersebut mencakup perubahan harga pada seluruh barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Rincian peningkatan harga pada kelompok makanan sebesar 3,98 persen (2019); sebesar 1,89 persen (2020); sebesar 2,18 persen (2021). Pada tahun 2022 terjadi inflasi yang cukup tinggi pada kelompok komoditi ini yaitu mencapai 6,45 persen. Kenaikan harga beras, daging ayam, telur, cabe serta kenaikan cukai rokok menjadi pendorong tingginya inflasi pada tahun 2022. Kenaikan harga cukup tinggi masih berlangsung hingga tahun 2023 dengan kenaikan sebesar 3,52 persen hal ini didorong oleh inflasi pada

komoditas rokok kretek filter akibat kenaikan cukai rokok pada Januari 2023, dilanjutkan oleh kenaikan harga beras dan cabai rawit.

Tabel 10. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Majalengka, Tahun 2019-2023

<i>(Persen)</i>					
Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	3,98	1,89	2,18	6,45	3,52
b. Pakaian dan Alas Kaki	2,24	3,03	0,96	1,31	1,46
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	2,14	0,93	1,16	2,14	2,98
d. Kesehatan dan Pendidikan	5,56	2,55	0,75	2,21	2,76
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	2,55	-0,06	0,65	4,44	5,08
f. Hotel dan Restoran	2,13	0,87	1,02	3,83	1,71
g. Lainnya	4,91	3,06	2,06	5,29	3,70

Keterangan: *sementara **sangat sementara

Sementara itu, harga pakaian dan alas kaki cenderung stabil dan terkendali yaitu sebesar 2,24 persen (2019); 3,03 persen (2020); 0,96 persen (2021); 1,31 persen (2022) dan pada tahun 2023 meningkat sebesar 1,46 persen. Harga produk pakaian dan alas kaki cenderung stabil, karena ketersediaan suplai tidak bersifat musiman, juga karena sifat komoditinya yang tahan lama. Hal yang lebih mempengaruhi harga komoditi ini adalah adanya peningkatan harga produksi karena kenaikan bahan baku atau bahan bakar.

Harga kelompok perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah cukup terkendali, pada periode tahun 2019-2021 pada kisaran 1 – 2 persen. Memasuki tahun 2022 terjadi kenaikan harga pada kelompok ini sehingga mendorong inflasi sebesar 2,14 persen. Inflasi berlanjut hingga tahun 2023 dengan inflasi sebesar 2,98 persen.

3.2.2. Konsumsi Akhir LNPRT

Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam kegiatannya, LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup.

Peranan konsumsi akhir LNPRT di dalam PDRB menurut pengeluaran masih sangat minor apabila dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal itu menunjukkan bahwa peranan institusi LNPRT dalam perekonomian suatu wilayah semestinya dapat lebih ditingkatkan lagi. Nilai konsumsi akhir LNPRT atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT Kabupaten Majalengka, Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Miliar Rp)	192,88	188,75	193,44	207,88	245,37
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	136,28	130,74	132,63	137,44	155,79
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0,62	0,59	0,57	0,55	0,59
Pertumbuhan (ADHK 2010)	2,65	-4,07	1,45	3,63	13,35

Keterangan: *sementara **sangat sementara

Dalam lima tahun terakhir, peranan konsumsi akhir LNPRT tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,62 persen, sedangkan yang terendah adalah pada tahun 2022 yaitu sebesar 0,55 persen. Di tahun 2023 baru menunjukkan peningkatan peranan yaitu menjadi sebesar 0,59 persen terhadap nilai perekonomian Majalengka.

Jika dilihat besaran nilainya, dalam lima tahun terakhir konsumsi akhir LNPRT mengalami fluktuasi, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Nilai konsumsi akhir LNPRT salah satunya dipengaruhi oleh aktivitas politik, di mana pengeluaran konsumsi partai politik pada tahun-tahun menjelang dilangsungkannya Pemilu maupun Pilkada akan mendongkrak nilai konsumsi akhir LNPRT seperti halnya kondisi di tahun 2023. Begitu pula dengan banyaknya berbagai kejadian bencana, hal itu dapat pula meningkatkan nilai pengeluaran konsumsi LNPRT karena meningkatnya biaya layanan yang dikeluarkan.

Nilai konsumsi akhir LNPRT di tahun 2019 salah satunya dipengaruhi oleh kegiatan pesta demokrasi berupa pemilihan anggota legislatif di tingkat pusat maupun daerah serta pemilihan Presiden Indonesia digelar serentak pada 17 April 2019. Kegiatan persiapan untuk Pilpres dan pemilihan anggota legislatif pusat daerah sudah dilakukan di tahun 2018. Meskipun sejak awal tahun 2019 kegiatan kampanye calon anggota legislatif maupun calon presiden makin gencar dilaksanakan, namun durasinya tidak sepanjang persiapan di tahun 2018. Nilai konsumsi akhir LNPRT di tahun 2019 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019, yaitu sebesar 192,88 miliar rupiah.

Terjadinya pandemi Covid-19 menyebabkan Pemberlakuan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara menyeluruh hingga secara proporsional memberi pengaruh pula pada aktivitas LNPRT. Perayaan Hari Raya dan hari besar keagamaan di tempat-tempat ibadah dibatasi, bahkan ditiadakan, misalnya pada penyelenggaraan ibadah Shalat Tarawih di Bulan Ramadhan, Shalat Idul Fitri 1442 H, dan kegiatan kebaktian di gereja. Hal ini mengakibatkan kegiatan LNPRT yang bergerak di bidang keagamaan menurun. Kondisi tersebut menyebabkan nilai konsumsi akhir LNPRT di tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Konsumsi akhir LNPRT 2020 adalah sebesar 188,75 miliar rupiah.

Memasuki tahun 2021, pandemi Covid-19 belum berakhir dan masih sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi Majalengka. Sepanjang tahun 2021, nilai konsumsi akhir LNPRT Majalengka mengalami peningkatan sebesar 4,68 miliar rupiah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, atau menjadi sebesar 193,44 miliar rupiah.

Di tahun 2022, nilai konsumsi akhir LNPRT Majalengka kembali meningkat hingga mencapai 207,88 miliar rupiah.

Tahun 2023, merupakan tahun persiapan Pemilu 2024 baik pemilihan presiden dan wakilnya juga pemilihan anggota legislatif yang dilakukan secara serentak. Pada tahun itu partai politik mulai melakukan persiapan sosialisasi dan kampanye. Hal itu menyebabkan peningkatan konsumsi akhir LNPRT di tahun 2023 mencapai 245,37 miliar rupiah. Peranan konsumsi akhir LNPRT pun sedikit terkoreksi pada tahun itu menjadi 0,59 persen terhadap nilai PDRB.

Pertumbuhan pengeluaran konsumsi LNPRT ADHK tahun dasar 2010 juga berturut-turut adalah 2,65 persen (2019), -4,07 persen (2020); 1,45 persen (2021); 3,63 persen (2022) dan 13,35 persen (2023). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2023 karena adanya persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden di tahun 2024.

3.2.3. Konsumsi Akhir Pemerintah

Pemerintah merupakan salah satu institusi yang memiliki peran dalam perekonomian wilayah, baik sebagai pencipta nilai tambah maupun sebagai yang melakukan konsumsi. Peranan pemerintah dalam melakukan konsumsi diantaranya adalah untuk membiayai kebutuhan barang dan jasa dalam menjalankan pemerintahan. Termasuk di dalamnya adalah biaya untuk pegawai, belanja bantuan sosial, serta penyusutan barang modal. Konsumsi pemerintah sama dengan nilai output untuk komoditas nonpasar. Artinya adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melayani masyarakat. Selain nilai output pemerintah nonpasar, ada juga output pemerintah dengan harga pasar. Output pasar tersebut diantaranya adalah retribusi dan penerimaan lain-lain yang sah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berupa penerimaan dari fasilitas sosial dan fasilitas umum, serta pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan

barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah. b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga). c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri.

Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan jasa layanan pada publik atau masyarakat dalam bentuk jasa kolektif maupun individual. Dalam praktek, pengeluaran pemerintah ini selalu dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik), meskipun tidak seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah secara total menunjukkan peningkatan pada periode 2019-2023. Tahun 2019 pengeluaran konsumsi pemerintah ADH berlaku sebesar 2.772,95 miliar rupiah. Pada tahun 2023, nilai pengeluaran tersebut mencapai 3.196,79 miliar rupiah. Dari segi ADH Konstan 2010, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah mengalami peningkatan pada tahun 2019-2021. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan

pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 1.804, 50 miliar rupiah. Hal ini sejalan dengan penurunan APBN/APBD untuk belanja pegawai dan belanja modal.

Tabel 12. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Majalengka, Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah (<i>Miliar Rp</i>)					
a. ADHB	2.772,95	2.808,04	2.966,77	3.000,82	3.196,79
b. ADHK 2010	1.759,53	1.761,38	1.828,27	1.804,50	1.876,64
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	8,85	8,73	8,69	7,94	7,66
Konsumsi Pemerintah Per Kapita (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	2.283,84	2.156,10	2.256,09	2.259,65	2.384,57
b. ADHK 2010	1.449,17	1.352,44	1.390,31	1.358,81	1.399,83
Pertumbuhan (%)					
a. Total konsumsi pemerintah	3,33	0,11	3,80	-1,30	4,00
b. Konsumsi pemerintah perkapita	2,07	-6,67	2,80	-2,27	3,02
Jumlah Penduduk (<i>000 orang</i>)	1.214,16 ¹⁾	1.302,38 ²⁾	1.315,01 ³⁾	1.328,01 ³⁾	1.340,62 ³⁾

Keterangan: *sementara **sangat sementara

1) Jumlah Penduduk Berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk SUPAS 2015

2) Jumlah Penduduk Berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023

3) Jumlah Penduduk Berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk SP2020

Jika dicermati lebih lanjut, proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB juga mengalami penurunan secara berturut-turut selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2019 peranannya sebesar 8,85 persen, kemudian menurun pada tahun 2023 menjadi 7,66 persen. Hal tersebut disebabkan karena pada tahun 2020 belanja pemerintah difokuskan pada anggaran kesehatan, bantuan dan perlindungan sosial serta pemulihan ekonomi akibat pandemi *Covid*. Sementara di tahun 2021 dan 2022 saat kondisi membaik anggaran pemerintah mulai beralih kepada pembangunan infrastruktur yang sempat terhenti di tahun 2020.

Pengeluaran konsumsi pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan kepada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Peningkatan pelayanan pemerintah di Kabupaten Majalengka kepada masyarakat dapat diamati dari peningkatan konsumsi pemerintah per kapita ADH Berlaku dimana selama 2019-2023 terjadi peningkatan pada rata-rata konsumsi per kapita, kecuali pada tahun 2020 ada penurunan. Konsumsi pemerintah per kapita ADH Berlaku pada tahun 2019 sebesar 2,28 juta rupiah. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 2,16 juta rupiah kemudian terus meningkat kembali hingga 2,38 juta rupiah pada tahun 2023. (lihat Tabel 11).

Rata-rata konsumsi pemerintah per kapita ADH Konstan (2010) menunjukkan adanya penurunan pada tahun 2020. Hal tersebut dapat dilihat dari laju pertumbuhannya, pada tahun 2020 konsumsi pemerintah per kapita mengalami penurunan sebesar -6,67 persen, kemudian meningkat sebesar 2,80 persen pada tahun 2021, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar -2,27 persen dan meningkat kembali pada tahun 2023 sebesar 3,02 persen.

Secara umum, gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara “riil” ini menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per penduduk). Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas pengeluaran sumber daya finansial oleh pemerintah.

3.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)³. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak

³ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Investasi merupakan komponen PDB/PDRB yang menghubungkan antara saat ini dan masa mendatang. Investasi memegang peranan penting tidak hanya dalam pertumbuhan siklus usaha jangka Panjang tetapi juga dalam jangka pendek karena merupakan komponen yang paling tidak stabil dalam PDRB. Mankiw (2010) mengemukakan bahwa bagian terbesar dari pengeluaran investasi yaitu sejumlah tiga per empat dari total adalah investasi tetap bisnis. Adapun yang dimaksud bisnis adalah investasi barang yang dibeli oleh perusahaan untuk digunakan dalam produksi yang akan datang. Kata tetap artinya pengeluaran ini untuk kapital yang akan tinggal untuk sementara sebagai lawan dari investasi persediaan, yang akan digunakan atau dijual dalam waktu singkat. Investasi tetap bisnis mencakup semuanya, mulai dari perabot kantor hingga pabrik, komputer dan mobil perusahaan.

Perkembangan Investasi di Kabupaten Majalengka selama tahun 2023 tercermin dari beberapa indikator ekonomi yaitu informasi belanja modal berupa pembangunan infrastruktur dan belanja modal non bangunan yang dilakukan oleh seluruh institusi pelaku ekonomi, rumah tangga, lembaga non profit, pemerintah dan korporasi. Informasi pendukung untuk mengetahui nilai investasi dapat diperoleh dari data Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) serta fenomena pembangunan perindustrian di Majalengka.

Perkembangan aktivitas investasi fisik di Majalengka pada periode 2019-2023 menunjukkan peningkatan kecuali pada tahun 2020. Akibat dari pembatasan aktivitas perekonomian sebagai dampak dari pandemic *Covid-19*, aktivitas fisik pun mengalami penurunan. Tercatat nilai PMTB tahun 2020 menurun sebanyak 515,75 miliar rupiah dibandingkan dengan nilai pada tahun 2019 menjadi 10.947,53 miliar rupiah.

Seiring dengan pemulihan ekonomi dari dampak pandemi, aktivitas investasi fisik di Majalengka mengalami peningkatan pada tahun 2021-2023, masing-masing

menjadi 11.775,55 miliar rupiah, 12.693,16 miliar rupiah dan 13.925,03 miliar rupiah. Nilai tersebut bahkan sudah melebihi kondisi sebelum pandemi pada tahun 2019.

Tabel 13. Perkembangan dan Struktur Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Kabupaten Majalengka Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (Miliar Rp)	11.463,28	10.947,53	11.775,55	12.639,16	13.925,03
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	7.848,13	7.462,53	7.980,04	8.114,68	8.647,48
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	36,58	34,02	34,47	33,46	33,38
Struktur PMTB ⁴					
a. Bangunan (Miliar Rp)	9.845,56	9.360,81	9.861,90	10.447,14	11.362,87
(%)	85,89	85,51	83,75	82,66	81,60
b. Non Bangunan (Miliar Rp)	1.617,72	1.586,72	1.913,65	2.192,02	2.562,16
(%)	14,11	14,49	16,25	17,34	18,40
Total PMTB (Miliar Rp)	11.463,28	10.947,53	11.775,55	12.639,16	13.925,03
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan (%)					
a. Bangunan	4,02	-5,28	5,30	0,15	5,37
b. Non Bangunan	0,09	-2,60	16,94	10,13	12,56
Total PMTB	3,46	-4,91	6,93	1,69	6,57

Keterangan: *sementara **sangat sementara

Selain dinilai ADH berlaku, PMTB juga dinilai menurut ADH konstan 2010 atau atas dasar harga berbagai produk yang dievaluasi dengan harga pada tahun 2010. Pengeluaran untuk pembentukan modal (PMTB) mempunyai tren yang sama antara ADH konstan dengan harga berlakunya. Kinerja PMTB menunjukkan adanya kenaikan pada periode 2019-2023, kecuali pada tahun 2020, tercermin dari pertambahan nilai PMTB ADH konstan selama periode tersebut. Dari 7.848,13 miliar rupiah pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar -4,91 persen pada tahun 2020 menjadi 7.462,53 miliar rupiah. Peningkatan nilai PMTB ADH konstan 2010 menggambarkan

⁴ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)

pertumbuhan riil komponen PMTB di Majalengka karena nilainya tidak dipengaruhi oleh kenaikan atau penurunan harga komponen PMTB.

Kinerja PMTB pada tahun 2020 turut terdampak pandemi *Covid-19* sehingga nilai riil mengalami kontraksi hingga 4,91 persen dibanding tahun sebelumnya menjadi 7.462,53 miliar rupiah. Pada tahun 2021 sampai 2023, kinerja PMTB kembali menguat yang tercermin pada pertumbuhan positif masing-masing sebesar 6,93 persen, 1,69 persen dan 6,57 persen dengan nilai mencapai 8.647,48 miliar rupiah pada tahun 2023.

Komponen PMTB dalam perekonomian Majalengka memiliki kontribusi kedua terbesar setelah Konsumsi Rumah Tangga. Kontribusi PMTB terhadap perekonomian Majalengka mengalami capaian terbesar di tahun 2019 yaitu sebesar 36,58 persen dan terendah di tahun 2023 sebesar 33,38 persen.

Komponen PMTB didisagregasi menjadi dua subkomponen dalam publikasi ini yaitu bangunan dan non bangunan. Pengeluaran untuk jenis aset fisik berupa bangunan mendominasi dalam perekonomian Majalengka. Hal ini terlihat dari proporsi PMTB Bangunan sebesar lebih dari 80 persen bagian total PMTB. Peranan komponen PMTB Bangunan terbesar terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 85,89 persen dan berangsur-angsur mengalami penurunan hingga menjadi 81,60 persen pada tahun 2023.

Sementara itu komponen PMTB non bangunan memiliki rincian sebagai berikut: Mesin dan Perlengkapan; Kendaraan; Peralatan Lainnya; Tanaman Menghasilkan Produk Berulang; Hewan Menghasilkan Berulang; Produk Kekayaan Intelektual dan Biaya Pemindahan Kepemilikan Aset yang Tidak Diproduksi. Selama periode 2019-2023, peranan PMTB non bangunan terbesar terjadi pada tahun 2023 sebesar 18,40 persen dan terendah pada tahun 2019 sebesar 14,11 persen.

Secara riil subkomponen PMTB bangunan pada tahun 2019 menunjukkan kinerja positif sebesar 4,02 persen. Aktivitas pembangunan sarana dan prasarana pada tahun 2020 menurun dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar

(PSBB) sehingga berdampak pada kinerja PMTB bangunan yang berkontraksi sebesar 5,28 persen. Pada tahun 2021 meskipun masih terdapat pembatasan aktivitas ekonomi kinerja PMTB bangunan mengalami peningkatan sebesar 5,30 persen. Namun mengalami perlambatan pada tahun 2022 menjadi 0,15 persen. Pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi 5,37 persen.

Sementara itu kinerja komponen PMTB non bangunan pada tahun 2019 hanya mampu tumbuh sebesar 0,09 persen. Pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,60 persen sebagai dampak pandemi *Covid-19*. Belanja barang modal ini kembali meningkat pada tahun 2021, 2022 dan 2023 dengan kinerja positif masing-masing sebesar 16,94 persen, 10,13 persen, dan 12,56 persen.

3.2.5. Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk "**persediaan**" berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif). Secara makro, inventori merupakan bagian dari pembentukan modal atau investasi fisik. Informasi inventori menjelaskan mengenai porsi investasi yang telah terealisasi dalam bentuk barang jadi maupun setengah jadi dalam berbagai aktivitas produksi. Sebagian investasi ini direalisasikan untuk keperluan bahan baku maupun bahan penolong.

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung

berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis lebih rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana dilakukan pada komponen pengeluaran lainnya.

Tabel 14. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori, Kabupaten Majalengka Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (Miliar Rp)	985,91	508,12	-280,49	32,87	28,71
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	590,70	302,70	-156,63	18,35	15,64
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	3,15	1,58	-0,82	0,09	0,07

Keterangan: *sementara **sangat sementara

Kontribusi Komponen Perubahan Inventori dalam perekonomian Majalengka dalam lima tahun terakhir cukup rendah. Bahkan di tahun 2021 nilai perubahan inventori Majalengka bertanda negatif, yang berarti terjadi penurunan inventori di akhir tahun 2021 jika dibandingkan dengan awal tahun. Perkembangan nilai komponen perubahan inventori dan proporsinya dalam perekonomian Majalengka selama periode 2019-2023 ditampilkan pada Tabel 13.

Pada tahun 2019 nilai nominal perubahan inventori Majalengka adalah sebesar 985,91 miliar rupiah atau sebesar 3,15 persen dari nilai PDRB Majalengka pada tahun tersebut. Pada tahun 2020, dalam kondisi pandemi dimana kinerja perekonomian pada beberapa sektor lapangan usaha mengalami kontraksi, nilai komponen perubahan inventori Majalengka mengalami penurunan menjadi sebesar 508,12 miliar rupiah. Kebijakan *lockdown* di beberapa negara mitra dagang menyebabkan arus barang ekspor dan impor luar negeri menjadi terhambat. Begitu

pula dengan adanya pembatasan mobilitas manusia pun menyebabkan proses produksi barang dan jasa mengalami penurunan.

Pelonggaran aktivitas ekonomi yang diterapkan di tahun 2021 berdampak positif pada perbaikan perekonomian Majalengka. Peningkatan utilitas produksi memanfaatkan bahan baku yang sudah ada, sedangkan barang jadi yang tertahan di produsen maupun pedagang karena adanya pembatasan di tahun 2020 sudah mulai terdistribusikan seiring dengan penerapan PPKM berlevel. Hal itu mengakibatkan inventori di akhir tahun 2021 menjadi lebih rendah dari pada kondisi di awal tahun. Kondisi tersebut berimplikasi pada nilai perubahan inventori Majalengka bertanda negatif, yakni sebesar -280,49 miliar rupiah.

Selanjutnya di tahun 2022, perekonomian Majalengka kembali mendekati kondisi normal. Perubahan inventori kembali meningkat menjadi sebesar 32,87 miliar rupiah. Besaran perubahan inventori menunjukkan angka positif yang dapat diartikan bahwa terjadi penambahan dalam persediaan barang.

Perubahan nilai nominal komponen perubahan inventori dipengaruhi oleh perubahan volume dan perubahan harga, sehingga untuk melihat kondisi perubahan inventori dalam nilai riilnya, dapat digunakan nilai atas dasar harga konstan. Dalam lima tahun terakhir nilai riil komponen perubahan inventori Majalengka memperlihatkan pola yang sama dengan nilai nominalnya. Nilai riil komponen perubahan inventori sebesar 590,70 miliar rupiah pada tahun 2019 dan turun menjadi 302,70 miliar rupiah di tahun 2020. Kontraksi ekonomi yang terjadi di 2020 mempengaruhi jumlah inventori, dimana barang menjadi banyak yang tertahan di produsen maupun pedagang karena adanya pembatasan pergerakan.

Memasuki tahun 2021, produsen berusaha menggenjot utilitas seiring dengan adanya kebijakan pelonggaran kegiatan pada sektor-sektor tertentu. Proses produksi lebih banyak mengandalkan bahan baku yang sudah ada karena aktivitas impor belum kembali sepenuhnya normal. Distribusi barang berjalan jauh lebih baik dibandingkan tahun 2020, menyebabkan stok barang yang tertahan dapat dikurangi. Hal itu berimplikasi pada nilai riil komponen perubahan inventori yang bertanda negatif,

yakni sebesar -156,63 miliar rupiah. Selanjutnya pada tahun 2022, secara riil komponen perubahan inventori mengalami peningkatan dan menunjukkan angka positif sebesar 18,35 miliar rupiah dan tahun 2023 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 15,64 miliar rupiah.

3.2.6. Net Ekspor Barang dan Jasa

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kabupaten Majalengka, tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten lain di dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Kabupaten Majalengka. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari perhitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongannya bisa berbeda dengan ekspor. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kabupaten Majalengka diluar domestik, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa). Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor barang dan jasa dapat menunjukkan seberapa besar ketergantungan

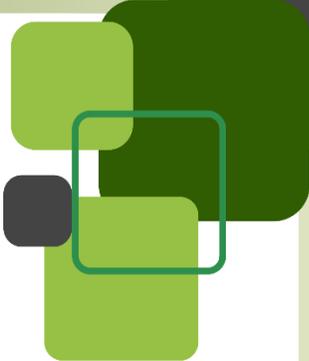
Kabupaten Majalengka terhadap ekonomi atau produk wilayah lain, baik wilayah kabupaten/kota lain dalam satu provinsi, provinsi lain maupun luar negeri.

Tabel 15. Perkembangan Net Ekspor Kabupaten Majalengka Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Net Ekspor					
a. ADHB (Miliar Rp)	-7.227,29	-5.408,23	-4.416,49	-4.408,57	-4.229,48
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	-4.082,17	-2.903,35	-2.250,53	-1.746,25	-1.641,90
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	-23,06	-16,81	-12,93	-11,67	-10,14

Keterangan: *sementara **sangat sementara

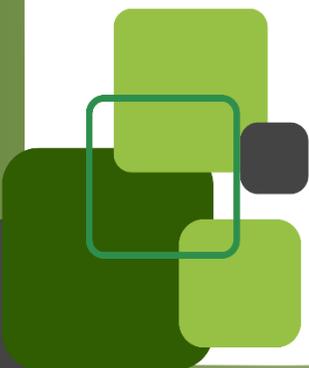
Selama tahun 2019-2023 nilai nominal net ekspor Kabupaten Majalengka selalu bernilai negatif, yang artinya neraca perdagangan antar daerah di Kabupaten Majalengka mengalami defisit, nilai ekspor Kabupaten Majalengka lebih rendah dari impor antar daerahnya. Pada tahun 2019 nilai net ekspor sebesar -7.227,29 miliar rupiah, dan bergerak menurun di tahun-tahun berikutnya yaitu -5.408,23 miliar rupiah (2020); -4.416,49 miliar rupiah (2021); -4.408,57 miliar rupiah (2022); dan -4.229,48 miliar rupiah pada tahun 2023. Sementara ditinjau dari proporsi komponen net ekspor antar daerah terhadap total PDRB Kabupaten Majalengka, berkisar diantara negatif 10 persen hingga negatif 23 persen, dengan proporsi tertinggi dialami pada tahun 2019 sebesar negatif 23,06 persen dan terendah sebesar negatif 10,14 persen di tahun 2023.



BAB IV

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019-2023

<https://majalengkakab.go.id>



Agregat dari PDRB merupakan nilai gabungan yang mengukur aspek tertentu dari keseluruhan aktivitas ekonomi. Agregat tersebut merupakan besaran pokok dan indikator ringkas untuk tujuan analisis ekonomi makro, perbandingan antar waktu maupun antar wilayah.

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah ekonomi Kabupaten Majalengka, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan produksi (nilai tambah), pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, dapat dilihat dari data PDRB perkapita.

PDRB Per Kapita Kabupaten Majalengka menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (Tabel 15), seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Majalengka rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai per kapita di masing-masing tahun tersebut. Sebelum adanya kontraksi perekonomian akibat adanya pandemi covid-19 di tahun 2020, pertumbuhan PDRB per kapita secara “riil” juga selalu meningkat di kisaran 5 sampai 7 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk, yang meningkat rata-rata pada kisaran 2 persen

setiap tahunnya. Dengan demikian maka pertumbuhan per kapita tersebut tidak saja terjadi secara “riil” tetapi juga terjadi secara kualitas.

Di awal tahun 2020, adanya pandemi covid-19 yang dirasakan oleh seluruh belahan dunia, mengakibatkan terciptanya kontraksi ekonomi yang merubah tatanan dan struktur perekonomian. Hal ini berdampak pula terhadap PDRB per kapita di Kabupaten Majalengka. Adanya pandemi, ditambah dengan faktor banyaknya penduduk yang pulang kampung karena tidak memiliki pekerjaan di kota yang berdampak pada lonjakan jumlah penduduk, menyebabkan penurunan PDRB per kapita Kabupaten Majalengka sebesar -5,94 persen di tahun 2020. Di tahun 2021, perekonomian di Kabupaten Majalengka secara perlahan mulai mengalami *recovery*, hal ini salah satunya ditandai dengan tumbuhnya nilai PDRB per kapita sebesar 3,74 persen, di tahun 2022 PDRB Per Kapita meningkat sebesar 5,58 persen, serta di tahun 2023 kembali meningkat sebesar 5,15 persen.

Tabel 16. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita Kabupaten Majalengka Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
a. ADHB	31.340,23	32.179,22	34.157,00	37.777,11	41.713,45
b. ADHK 2010	21.561,72	21.754,54	22.787,90	24.298,10	25.793,24
PDRB Per Kapita (Ribu Rp)					
a. ADHB	25.812,26	24.708,10	25.974,81	28.446,51	31.115,11
b. ADHK 2010	17.758,54	16.703,74	17.329,14	18.296,70	19.239,83
Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHK 2010	6,45	-5,94	3,74	5,58	5,15
Jumlah Penduduk (org)	1.214.16 ¹⁾	1.302.38 ²⁾	1.315.01 ³⁾	1.328.01 ³⁾	1.340.62 ³⁾
Pertumbuhan	1,24	7,27	0,97	0,99	0,95

Keterangan: *sementara; **sangat sementara;

1) Jumlah Penduduk Berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk SUPAS 2015/Number of Population Based on The Result of Population Projection SUPAS 2015

2) Jumlah Penduduk Berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023/Number of Population Based on The Result of Interim Population Projection 2020-2023

3) Jumlah Penduduk Berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk SP2020/Number of Population Based on The Result of Population Projection SP2020

4.2 PROPORSI PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Pada tahun 2019-2023 sebagian besar barang dan jasa yang berada di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (70-80 persen). Meskipun konsumsi akhir makin meningkat setiap tahunnya, namun proporsinya terhadap PDRB justru semakin mengalami penurunan. Peningkatan nilai konsumsi akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup manusia yang tercermin dari meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penurunan proporsi konsumsi akhir mengindikasikan penggunaan produk Kabupaten Majalengka yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir (berupa PMTB atau Ekspor) memiliki peran yang semakin besar, meskipun masih dalam skala yang relatif kecil.

Tabel 17. Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Majalengka, Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir ADHB (Miliar Rp)					
a. Rumah tangga	23.152,52	23.135,00	23.918,23	26.304,96	28.547,02
b. LNPRT	192,88	188,75	193,44	207,88	245,37
c. Pemerintah	2.772,95	2.808,04	2.966,77	3.000,82	3.196,79
Jumlah	26.118,35	26.131,79	27.078,44	29.513,66	31.989,18
PDRB ADHB (Miliar Rp)	31.340,23	32.179,22	34.157,00	37.777,11	41.713,45
Proporsi	83,34	81,21	79,28	78,13	76,69

Keterangan: *sementara **sangat sementara

4.3 INCREMENTAL CAPITAL VALUE ADDED RATIO (ICVAR)

Indikator *Incremental Capital Value Added Ratio (ICVAR)* merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*value added*) dari penggunaan investasi tersebut. ICVAR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan jumlah produksi yang dihasilkan. Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan nilai tambah dalam hal ini merupakan hasil aktivitas produksi berupa barang dan jasa yang dilakukan oleh residen suatu wilayah pada satu periode. Pendekatan ICVAR dan ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*) pada dasarnya sama dalam mengukur besarnya investasi yang terjadi. Dampak penambahan kapital terhadap penambahan *value added* NTB) diukur menggunakan ICVAR, sedangkan dampak penambahan kapital terhadap penambahan output diukur menggunakan ICOR. Penghitungan nilai ICVAR menggunakan indikator PDRB atas dasar harga konstan (PDRB riil).

ICVAR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap nilai tambah atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai tambah akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak “K” unit. Formula yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$ICVAR = \frac{\Delta K}{\Delta VA} = \frac{I}{\Delta VA} = \frac{I_t}{VA_t - VA_{t-1}}$$

Di mana: I_t = PMTB tahun ke t

VA_t = PDRB ADHK tahun ke t

VA_{t-1} = PDRB ADHK tahun ke t-1

Secara teori, ICVAR biasanya bernilai positif. Makin kecil nilai ICVAR mengandung makna bahwa investasi yang dilakukan makin efisien karena makin

cepat terjadi penambahan nilai tambah. Sebaliknya, makin besar nilai ICVAR menunjukkan investasi yang dilakukan makin tidak efisien karena makin lama penambahan nilai tambah yang diperoleh dari penambahan kapital.

Tabel 18. Incremental Capital Value Added Ratio (ICVAR) Kabupaten Majalengka, Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010) (miliar rupiah)	21.561,72	21.754,54	22.787,90	24.298,10	25.793,24
Perubahan Δ (PDRB _t - PDRB _{t-1}) (miliar rupiah)	1.554,84	192,82	1.033,36	1.510,20	1.495,14
PMTB (ADHK 2010) (miliar rupiah)	7.848,13	7.462,53	7.980,04	8.114,68	8.647,48
ICVAR	5,05	38,71	7,72	5,37	5,78

Keterangan: *sementara **sangat sementara

Melihat pergerakan nilai ICVAR Majalengka selama lima tahun terakhir (2019-2023), terlihat bahwa dari tahun ke tahun cukup berfluktuasi seperti terlihat pada Tabel 17. Pada masa sebelum pandemi *covid-19* di tahun 2019, nilai ICVAR Majalengka yaitu sebesar 5,05. Akan tetapi pada saat puncak pandemi di tahun 2020, nilai ICVAR meningkat signifikan ke angka 38,71. Hal ini mengindikasikan bahwa pada saat pandemi perekonomian menjadi sangat tidak efisien.

Setahun pasca pandemi, perekonomian berangsur membaik. Tahun 2021 nilai ICVAR tercatat kembali turun ke angka 7,72. Di tahun 2022, nilai ICVAR kembali mendekati angka normal seperti kondisi sebelum terjadinya pandemi *covid-19*, nilainya berada pada angka 5,37. Setahun berikutnya (2023), nilai ICVAR Majalengka mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,41 poin atau menjadi sebesar 5,78. ICVAR menjadi salah satu indikator tingkat efisiensi perekonomian suatu wilayah karena semakin kecil ICVAR berarti suatu investasi mampu menghasilkan *value added* (nilai

tambah) yang semakin besar, begitu pula sebaliknya. Akan tetapi ketentuan tersebut tidak dapat diperlakukan sama pada semua lapangan usaha. Lapangan usaha yang sifat investasinya cepat dalam menghasilkan nilai tambah akan berbeda dengan lapangan usaha yang sifat investasinya lambat dalam menghasilkan nilai tambah. Atau dalam arti lain, efisiensi lapangan usaha yang berteknologi padat karya akan sangat berbeda dengan efisiensi pada lapangan usaha yang padat kapital.

Nilai investasi yang direfleksikan dari nilai PMTB, kontribusi investasi riil di dalam struktur PDRB Kabupaten Majalengka pada tahun 2023 sebesar 8.647,48 miliar rupiah, baik investasi dalam negeri maupun investasi asing. Jumlah investasi itu menyumbang pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 33,52 persen. Adapun pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama tercatat sebesar 6,15 persen.

PDRB MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2023

PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN MAJALENGKA

6,15
Persen

PDRB 2023

Atas Dasar Harga Berlaku



Rp. 41.713,45 (miliar)

Atas Dasar Harga Konstan



Rp. 25.793,24 (miliar)

LAJU PERTUMBUHAN KOMPONEN PDRB PENGELUARAN



4,82
PERSEN

PENGELUARAN
KONSUMSI
RUMAH TANGGA



13,35
PERSEN

PENGELUARAN
KONSUMSI
LNPR



4,00
PERSEN

PENGELUARAN
KONSUMSI
PEMERINTAH



6,57
PERSEN

PEMBENTUKAN
MODAL TETAP
BRUTO

STRUKTUR PDRB

PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA	68,44 %
PENGELUARAN KONSUMSI LNPR	0,59 %
PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH	7,66 %
PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO	33,38 %
PERUBAHAN INVENTORI	0,07 %
NET EKSPOR	-10,14 %

SOURCE OF GROWTH

PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA	3,17 %
PENGELUARAN KONSUMSI LNPR	0,08 %
PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH	0,30 %
PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO	2,19 %

LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

TAHUN 2019-2023

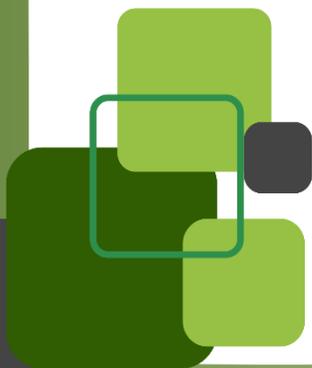
(dalam persen)



BAB V

PENUTUP

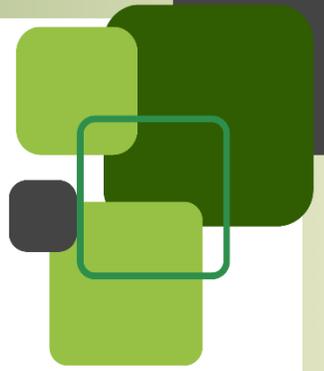
<https://majalengkakab.bps.go.id>



1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan aktivitas perekonomian di tingkat regional (kabupaten) pada suatu periode dengan menggunakan pedoman penyusunan yang sama yaitu SNNI 2010, dengan harapan hasil penghitungan PDRB akan konsisten dan memiliki keterbandingan secara wilayah.
2. PDRB menurut pengeluaran tahun 2019 s.d. 2023 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Majalengka pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan luar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah Rumah Tangga, Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT), Pemerintah, dan Perusahaan.
3. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk dan rumah tangga), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
4. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2019 s.d 2023, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.

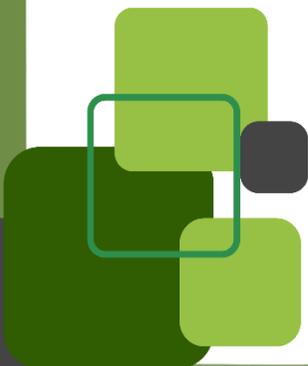
5. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia.

<https://majalengkakab.bps.go.id>



LAMPIRAN

<https://majalengkab.bps.go.id>



**Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Majalengka Menurut Pengeluaran, 2019-2023**

(Dalam Juta Rupiah)

KOMPONEN PENGELUARAN	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s.d. 1.g.)	23.152.518,71	23.135.001,20	23.918.225,25	26.304.956,16	28.547.015,74
1.a. Makanan, Minuman dan Rokok	12.007.829,42	12.335.150,49	12.856.646,64	14.369.789,24	15.602.023,76
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	1.121.244,59	1.060.142,38	1.081.957,69	1.135.902,44	1.195.954,43
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	2.193.504,51	2.195.397,65	2.202.384,33	2.337.271,70	2.511.505,52
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	1.528.484,43	1.602.354,02	1.685.696,67	1.769.766,48	1.882.071,23
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	4.196.186,39	3.874.980,45	3.971.368,79	4.404.549,54	4.911.260,34
1.f. Hotel dan Restoran	880.058,41	840.753,85	853.062,43	930.083,50	1.001.946,98
1.g. Lainnya	1.225.210,96	1.226.222,37	1.267.108,70	1.357.593,26	1.442.253,49
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	192.877,25	188.750,65	193.436,20	207.877,77	245.374,18
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.772.945,66	2.808.044,75	2.966.774,49	3.000.815,04	3.196.793,79
4. Pembentukan Modal	11.463.278,95	10.947.530,87	11.775.546,58	12.639.161,03	13.925.032,32
4.a. Bangunan	9.845.554,90	9.360.808,08	9.861.897,29	10.447.141,80	11.362.869,19
4.b. Non Bangunan	1.617.724,05	1.586.722,78	1.913.649,29	2.192.019,23	2.562.163,13
5. Perubahan Inventori	985.906,85	508.122,33	-280.492,56	32.871,79	28.713,31
6. Net Ekspor Impor Antar Daerah	-7.227.294,33	-5.408.232,75	-4.416.491,09	-4.408.569,18	-4.229.480,65
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	31.340.233,10	32.179.217,04	34.156.998,87	37.777.112,62	41.713.448,69

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (2010=100)
Kabupaten Majalengka Menurut Pengeluaran, 2019-2023**

(Dalam Juta Rupiah)

KOMPONEN PENGELUARAN	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s.d. 1.g.)	15.309.254,54	15.000.532,46	15.254.120,93	15.969.387,50	16.739.594,15
1.a. Makanan, Minuman dan Rokok	6.954.443,68	7.011.771,15	7.151.976,78	7.509.272,65	7.876.150,14
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	857.938,82	787.340,13	795.875,53	824.754,03	855.849,84
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	1.590.076,38	1.576.828,42	1.563.688,83	1.624.687,88	1.695.316,84
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	1.108.870,65	1.133.572,05	1.183.679,94	1.215.807,50	1.258.249,97
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	3.214.825,18	2.970.418,76	3.024.711,80	3.212.165,96	3.408.408,86
1.f. Hotel dan Restoran	698.611,13	661.648,95	664.550,27	697.796,80	739.062,17
1.g. Lainnya	884.488,69	858.952,99	869.637,78	884.902,68	906.556,33
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	136.277,70	130.737,74	132.628,41	137.436,31	155.789,42
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.759.525,35	1.761.383,51	1.828.270,83	1.804.502,63	1.876.637,82
4. Pembentukan Modal	7.848.127,94	7.462.528,83	7.980.044,84	8.114.683,10	8.647.475,59
4.a. Bangunan	6.770.950,46	6.413.371,39	6.753.150,01	6.763.495,52	7.126.532,91
4.b. Non Bangunan	1.077.177,49	1.049.157,44	1.226.894,82	1.351.187,58	1.520.942,68
5. Perubahan Inventori	590.700,55	302.699,62	-156.627,39	18.349,49	15.642,31
6. Net Ekspor Impor Antar Daerah	-4.082.165,66	-2.903.347,15	-2.250.533,36	-1.746.254,98	-1.641.897,76
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	21.561.720,42	21.754.535,01	22.787.904,26	24.298.104,05	25.793.241,52

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Majalengka Menurut Pengeluaran, 2019-2023

(Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s.d. 1.g.)	73,87	71,89	70,02	69,63	68,44
1.a. Makanan dan Minuman Non Alkohol	38,31	38,33	37,64	38,04	37,40
1.b. Minuman Beralkohol	3,58	3,29	3,17	3,01	2,87
1.c. Pakaian	7,00	6,82	6,45	6,19	6,02
1.d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	4,88	4,98	4,94	4,68	4,51
1.e. Perabot, Peralatan rumah tangga dan	13,39	12,04	11,63	11,66	11,77
1.f. Kesehatan	2,81	2,61	2,50	2,46	2,40
1.g. Transportasi/Angkutan	3,91	3,81	3,71	3,59	3,46
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,62	0,59	0,57	0,55	0,59
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8,85	8,73	8,69	7,94	7,66
4. Pembentukan Modal Tetap	36,58	34,02	34,47	33,46	33,38
4.a. Bangunan	31,42	29,09	28,87	27,65	27,24
4.b. Non Bangunan	5,16	4,93	5,60	5,80	6,14
5. Perubahan Inventori	3,15	1,58	-0,82	0,09	0,07
6. Net Ekspor Impor Antar Daerah	-23,06	16,81	-12,93	-11,67	-10,14
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (2010=100) Kabupaten Majalengka Menurut Pengeluaran, 2019-2023

(Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s.d. 1.g.)	71,00	68,95	66,94	65,72	64,90
1.a. Makanan dan Minuman Non Alkohol	32,25	32,23	31,38	30,90	30,54
1.b. Minuman Beralkohol	3,98	3,62	3,49	3,39	3,32
1.c. Pakaian	7,37	7,25	6,86	6,69	6,57
1.d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	5,14	5,21	5,19	5,00	4,88
1.e. Perabot, Peralatan rumah tangga dan	14,91	13,65	13,27	13,22	13,21
1.f. Kesehatan	3,24	3,04	2,92	2,87	2,87
1.g. Transportasi/Angkutan	4,10	3,95	3,82	3,64	3,51
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,63	0,60	0,58	0,57	0,60
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8,16	8,10	8,02	7,43	7,28
4. Pembentukan Modal Tetap	36,40	34,30	35,02	33,40	33,53
4.a. Bangunan	31,40	29,48	29,63	27,84	27,63
4.b. Non Bangunan	5,00	4,82	5,38	5,56	5,90
5. Perubahan Inventori	2,74	1,39	-0,69	0,08	0,06
6. Net Ekspor Impor Antar Daerah	-18,93	-13,35	-9,88	-7,19	-6,37
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Majalengka Menurut Pengeluaran, 2019-2023

(Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s.d. 1.g.)	8,61	-0,08	3,39	9,98	8,52
1.a. Makanan dan Minuman Non Alkohol	10,29	2,73	4,23	11,77	8,58
1.b. Minuman Beralkohol dan Rokok	6,22	-5,45	2,06	4,99	5,29
1.c. Pakaian	3,66	0,09	0,32	6,12	7,45
1.d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	11,07	4,83	5,20	4,99	6,35
1.e. Perabot, Peralatan rumahtangga dan Pemeliharaan Rutin Rumah	6,37	-7,65	2,49	10,91	11,50
1.f. Kesehatan	8,35	-4,47	1,46	9,03	7,73
1.g. Transportasi/Angkutan	8,99	0,08	3,33	7,14	6,24
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	5,05	-2,14	2,48	7,47	18,04
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,06	1,27	5,65	1,15	6,53
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	6,55	-4,50	7,56	7,33	10,17
4.a. Bangunan	7,20	-4,92	5,35	5,93	8,77
4.b. Non Bangunan	2,78	-1,92	20,60	14,55	16,89
5. Perubahan Inventori					
6. Net Ekspor Impor Antar Daerah					
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	11,54	2,68	6,15	10,60	10,42

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 6. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Majalengka Menurut Pengeluaran, 2019-2023

(Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s.d. 1.g.)	4,77	-2,02	1,69	4,69	4,82
1.a. Makanan dan Minuman Non Alkohol	6,06	0,82	2,00	5,00	4,89
1.b. Minuman Beralkohol dan Rokok	3,89	-8,23	1,08	3,63	3,77
1.c. Pakaian	1,48	-0,83	-0,83	3,90	4,35
1.d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	5,22	2,23	4,42	2,71	3,49
1.e. Perabot, Peralatan rumahtangga dan Pemeliharaan Rutin Rumah	3,73	-7,60	1,83	6,20	6,11
1.f. Kesehatan	6,09	-5,29	0,44	5,00	5,91
1.g. Transportasi/Angkutan	3,89	-2,89	1,24	1,76	2,45
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,65	-4,07	1,45	3,63	13,35
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,33	0,11	3,80	-1,30	4,00
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,46	-4,91	6,93	1,69	6,57
4.a. Bangunan	4,02	-5,28	5,30	0,15	5,37
4.b. Non Bangunan	0,09	-2,60	16,94	10,13	12,56
5. Perubahan Inventori					
6. Net Ekspor Impor Antar Daerah					
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	7,77	0,89	4,75	6,63	6,15

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Lampiran 7. Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100)
Kabupaten Majalengka Menurut Pengeluaran, 2019-2023**

(Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s.d. 1.g.)	151,23	154,23	156,80	164,72	170,54
1.a. Makanan dan Minuman Non Alkohol	172,66	175,92	179,76	191,36	198,09
1.b. Minuman Beralkohol dan Rokok	130,69	134,65	135,95	137,73	139,74
1.c. Pakaian	137,95	139,23	140,85	143,86	148,14
1.d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	137,84	141,35	142,41	145,56	149,58
1.e. Perabot, Peralatan rumahtangga dan Pemeliharaan Rutin Rumah	130,53	130,45	131,30	137,12	144,09
1.f. Kesehatan	125,97	127,07	128,37	133,29	135,57
1.g. Transportasi/Angkutan	138,52	142,76	145,71	153,42	159,09
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	141,53	144,37	145,85	151,25	157,50
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	157,60	159,42	162,27	166,30	170,35
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	146,06	146,70	147,56	155,76	161,03
4.a. Bangunan	145,41	145,96	146,03	154,46	159,44
4.b. Non Bangunan	150,18	151,24	155,98	162,23	168,46
5. Perubahan Inventori					
6. Net Ekspor Impor Antar Daerah					
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	145,35	147,92	149,89	155,47	161,72

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Lampiran 8. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100)
Kabupaten Majalengka Menurut Pengeluaran, 2019-2023**

(Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s.d. 1.g.)	3,67	1,98	1,67	5,05	3,53
1.a. Makanan dan Minuman Non Alkohol	3,98	1,89	2,18	6,45	3,52
1.b. Minuman Beralkohol dan Rokok	2,24	3,03	0,96	1,31	1,46
1.c. Pakaian	2,14	0,93	1,16	2,14	2,98
1.d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	5,56	2,55	0,75	2,21	2,76
1.e. Perabot, Peralatan rumahtangga dan Pemeliharaan Rutin Rumah	2,55	-0,06	0,65	4,44	5,08
1.f. Kesehatan	2,13	0,87	1,02	3,83	1,71
1.g. Transportasi/Angkutan	4,91	3,06	2,06	5,29	3,70
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,34	2,01	1,02	3,71	4,13
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,71	1,16	1,79	2,48	2,44
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,99	0,44	0,59	5,55	3,39
4.a. Bangunan	3,06	0,38	0,05	5,77	3,22
4.b. Non Bangunan	2,68	0,70	3,13	4,01	3,84
5. Perubahan Inventori					
6. Net Ekspor Impor Antar Daerah					
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	3,49	1,77	1,33	3,72	4,02

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.

_____, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.

_____, *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.

_____, *Profil Ekonomi Rumah Tangga 1998*, Jakarta 1999.

Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.

Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC, 1979.

Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.

_____, *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.

_____, *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.

Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.

Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



*BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MAJALENGKA*

Jalan Gerakan Koperasi No. 39 Majalengka 45411

e-mail: bps3210@bps.go.id, Homepage: <http://majalengkakab.bps.go.id>

